

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Kota Modern

Perkembangan kota di era modern ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.⁴⁴ Kondisi ini menuntut adanya perencanaan kota yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga penciptaan ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif.⁴⁵ Perencanaan kota modern bukan sekadar membangun fisik kota, tetapi juga merancang sistem sosial dan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Dalam konteks penelitian ini, perencanaan kota modern menjadi landasan penting untuk memahami relevansi ajaran Nabi Muhammad saw terhadap tata kelola perkotaan.⁴⁷ Sebelum membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan topik tersebut, terlebih dahulu perlu dipaparkan definisi dan prinsip-prinsip perencanaan kota modern menurut literatur tata kota kontemporer.

1. Definisi Perencanaan Kota Modern

Mody dan Premeaux, sebagaimana dikutip oleh Hindun, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang seharusnya dicapai serta bagaimana cara merealisasikannya dalam kenyataan.⁴⁸ Sejalan dengan itu, Johnson (1973) menyatakan bahwa proses perencanaan dapat dianggap sebagai kendaraan untuk mencapai perubahan dalam sistem. Tanpa perencanaan, suatu sistem tidak akan mampu mengalami perubahan ataupun beradaptasi terhadap

⁴⁴ Harahap, "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia."

⁴⁵ Sutriadi, *Kota Cerdas Berkelanjutan Perspektif Perencana Kota*.

⁴⁶ Mawar Rahmadita, Halimatussa'diyah, and Deddy Ilyas, "Ekologi Perkotaan: Telaah Ayat-Ayat Keindahan Alam Sebagai Upaya Mewujudkan Livable City," *Jurnal Riset Agama* 5, no. 1 (2025): 81–99, <https://doi.org/10.15575/jra.v5i1.43649>.

⁴⁷ Abdul Mukti Thabrani, "Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad Saw," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Maznusia* 4, no. 1 (2014): 13–30.

⁴⁸ Hindun, "Perencanaan Strategis Dan Prilaku Manajerial Lembaga-Lembaga Pendidikan," *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin* 13, no. 1 (2015): 113–28.

kekuatan-kekuatan lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks sistem sosial, perencanaan menjadi satu-satunya sarana untuk menghadirkan inovasi dan memastikan kemampuan beradaptasi, karena proses tersebut melibatkan pengambilan keputusan oleh manusia sebagai penggerak utama perubahan.⁴⁹

Menurut Kuncoro, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan mencakup pengambilan keputusan atau pemilihan di antara berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu di masa mendatang.⁵⁰ Artinya, perencanaan bukan hanya sekadar menyusun rencana jangka pendek, tetapi merupakan rangkaian proses yang dinamis dan berorientasi pada masa depan, dengan mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Menurut Y. Dror dalam kutipan Kunarjo, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Ini menunjukkan bahwa perencanaan bukan sekadar menyusun langkah-langkah, tetapi merupakan proses strategis yang mempersiapkan tindakan-tindakan yang terstruktur guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sadar dan terarah.⁵¹

Jadi, untuk keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses yang sistematis, berkesinambungan, dan terarah untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan tujuan tersebut. Perencanaan juga berfungsi sebagai alat perubahan, penyesuaian terhadap lingkungan, dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang rasional dan efektif dalam berbagai konteks, baik individu, organisasi, maupun sistem sosial secara lebih luas.

Perencanaan kota adalah bentuk perencanaan fisik yang bersifat menyeluruh, karena mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan seperti sosial-budaya,

⁴⁹ Hindun.

⁵⁰ Mudrajat Kuncoro, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan?* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 50.

⁵¹ Kunarjo, *Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan*. (Depok: Universitas Indonesia, 2002), 41.

ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan wilayah ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan kota disusun sebagai upaya pengelolaan pemanfaatan ruang kota yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang saling berhubungan atas sumber daya yang terbatas. Selain itu, perencanaan ini juga memperhatikan hubungan antar fungsi ruang dan kesesuaian dengan kapasitas infrastruktur yang mendukung masing-masing peruntukan tersebut.⁵²

Perencanaan kota modern merupakan suatu proses perumusan kebijakan, strategi, dan tindakan yang bertujuan mengatur penggunaan ruang kota secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.⁵³ Menurut teori perencanaan tata kota, konsep ini mencakup pengaturan tata ruang, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pengelolaan lingkungan, serta penataan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan layak huni bagi semua kalangan.⁵⁴

Dalam perspektif *urban planning* kontemporer, perencanaan kota modern tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan, bangunan, dan jaringan utilitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan mobilitas penduduk, pemenuhan hak atas hunian yang layak, pemerataan akses terhadap fasilitas publik, pengendalian pencemaran lingkungan, dan penciptaan ruang publik yang inklusif.⁵⁵

Selain itu, perencanaan kota modern dipandang sebagai suatu sistem yang bersifat multi-disipliner, melibatkan bidang arsitektur, teknik sipil, transportasi, ekonomi, hukum, hingga sosiologi.⁵⁶ Pendekatan ini menempatkan kota sebagai sebuah ekosistem yang saling terkait antara lingkungan buatan dan lingkungan

⁵² Respati Wikantiyoso, "Mitigasi Bencana Di Perkotaan: Adaptasi Atau Antisipasi Perencanaan Dan Perancangan Kota ? (Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana)," *Local Wisdom* 2, no. 1 (2010): 18–29, <http://www.respati.ucoz.com>.

⁵³ Siahay et al., *Pengantar Perencanaan Kota*.

⁵⁴ Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*.

⁵⁵ Arief Rachadiono Wismansyah, "Perencanaan Strategis Dalam Pengembangan Smart City Kota Tangerang" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

⁵⁶ Djuni Prihatin, Susi Darmayanti, and Rezldi Alief Pramadha, *Aplikasi Teori Perencanaan: Dari Konsep Ke Realita* (Yogyakarta: Buana Grafika, 2019), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

alami, sehingga perencanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.⁵⁷ Dengan demikian, perencanaan kota modern merupakan upaya terstruktur untuk menciptakan ruang perkotaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵⁸

2. Prinsip-prinsip Perencanaan Kota Modern

Perencanaan kota modern pada hakikatnya berlandaskan sejumlah prinsip yang bertujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni (*livable*), berkelanjutan (*sustainable*), dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.⁵⁹ Prinsip-prinsip ini berkembang seiring dinamika kebutuhan kota di era kontemporer yang menuntut keseimbangan antara aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁶⁰

Prinsip perencanaan mencakup beberapa hal penting yang menjadi landasan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Pertama, perencanaan harus benar-benar mengarahkan pada tercapainya tujuan dengan meminimalkan kesalahan langkah dan menghindari pengorbanan yang tidak perlu, yang hanya dapat dicapai melalui pertimbangan matang sejak awal. Kedua, perencanaan menjadi tahap awal yang mendasari seluruh rangkaian proses kerja, karena berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan penentu arah. Ketiga, perencanaan harus meliputi seluruh aspek pelaksanaan, mulai dari pengaturan sumber daya, pengarahan, koordinasi, hingga pengawasan. Keempat, perencanaan sebaiknya menyediakan berbagai alternatif pilihan terkait bahan, waktu, tenaga, biaya, dan faktor lain yang relevan. Kelima, perencanaan perlu dirancang secara efisien dan hemat sumber daya. Keenam, fokus perencanaan diarahkan pada hal-hal yang benar-benar penting, disusun dengan

⁵⁷ Mukaryanti, Alinda Medrial Zain, and Nawa Suwedi, "Keberlanjutan Fungsi Ekologis Sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 7, no. 1 (2006): 7–15, <https://www.neliti.com/id/publications/152533/>.

⁵⁸ Siahay et al., *Pengantar Perencanaan Kota*.

⁵⁹ Gito Sugiyanto et al., *Perencanaan Wilayah Dan Perkotaan* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

⁶⁰ Sabaqoni, "Fenomena Modernitas Kota Mandiri: Studi Sosiologi Perkotaan Di Kota Bintaro Jaya, Tangerang Selatan."

jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele. Ketujuh, perencanaan harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah. Terakhir, diperlukan strategi yang dapat diterima semua pihak agar pelaksanaan rencana berjalan lancar dan efektif.⁶¹

Menurut Amallya dkk. (2023), prinsip-prinsip kota modern meliputi empat aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, optimal, yaitu pengelolaan kota yang efisien, tangguh terhadap perubahan, dapat berkembang (*scalable*), fleksibel, aman, dan inovatif. Kedua, terintegrasi, yang menekankan konektivitas dan kesinambungan sistem antar sektor melalui interoperabilitas, koordinasi kinerja, dan penerapan standar sesuai regulasi yang berlaku. Ketiga, inklusif dan terbuka, yang memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kota, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Keempat, sirkuler dan berkelanjutan, yang diterapkan di berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan lingkungan, di mana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan usaha, membuka lapangan kerja, menciptakan perputaran ekonomi berkelanjutan, serta menjaga lingkungan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan manajemen energi hijau.⁶²

Prinsip-prinsip perencanaan kota modern pada dasarnya selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat, seperti yang dijelaskan oleh Nadjib (2021). Pertama, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga kota dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, partisipasi berarti keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kota. Ketiga, berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan memastikan kebijakan perkotaan memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi semua. Keempat, transparansi, sehingga proses perencanaan dapat

⁶¹ Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (Jakarta, 2008), 8, <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>.

⁶² Dita Amallya et al., *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara* (Jakarta: Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital, 2023), 21–22.

dipantau, dipahami, dan diawasi publik secara terbuka. Kelima, akuntabilitas, di mana setiap kebijakan dan program memiliki penjelasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga. Keenam, selektivitas, yaitu menentukan prioritas program dan penggunaan sumber daya secara cermat untuk mencapai dampak optimal. Ketujuh, efisiensi dan efektivitas, yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan teknologi secara tepat sasaran. Kedelapan, keberlanjutan, dengan menjamin kesinambungan program dan koordinasi lintas sektor demi keberlangsungan kualitas hidup kota. Kesembilan, akurasi, yaitu penggunaan data dan informasi yang valid, lengkap, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Terakhir, proses iteratif, yang memungkinkan penyesuaian berulang berdasarkan evaluasi untuk mencapai hasil perencanaan yang semakin baik.⁶³

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) pada era desentralisasi, penerapan prinsip-prinsip *governance* menjadi landasan penting agar perencanaan berjalan efektif dan inklusif. Prinsip yang menjadi fokus meliputi partisipasi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas.⁶⁴

Menurut Siahay (2024), prinsip utama perencanaan kota meliputi perencanaan komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek pembangunan, perencanaan penggunaan lahan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara optimal, perencanaan transportasi guna menciptakan sistem mobilitas yang efektif, perencanaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan, perencanaan pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang merata, serta perencanaan perumahan yang menjamin ketersediaan hunian layak. Selain itu, perencanaan kota juga mencakup desain dan arsitektur perkotaan yang estetis dan fungsional, pelestarian sejarah untuk menjaga nilai-nilai budaya dan identitas lokal,

⁶³ Abdul Nadjib, *Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 205–6, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁶⁴ Bambang Utoyo Sutiyoso, “Analisis Kebijakan Prinsip Governance Dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Perencanaan Kota,” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2017): 45–56, <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11740>.

serta analisis dampak lingkungan sebagai upaya mengantisipasi dan meminimalkan potensi kerugian terhadap ekosistem. Keseluruhan prinsip ini saling terkait dan menjadi kerangka kerja strategis dalam mewujudkan kota yang tertata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶⁵

Secara prinsip, kota modern dibangun dengan tujuan yang jelas serta mengedepankan perencanaan komprehensif yang mencakup pengelolaan lahan secara optimal, sistem transportasi yang efektif, perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi yang merata, penyediaan perumahan layak, desain dan arsitektur perkotaan yang fungsional dan estetis, serta pelestarian nilai sejarah. Selain itu, kota modern menerapkan analisis dampak lingkungan, efisiensi, keberlanjutan, integrasi antar sektor, keterbukaan informasi, partisipasi aktif masyarakat, akuntabilitas, pemberdayaan warga, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, dan pengambilan keputusan berbasis data akurat dengan proses evaluasi berkelanjutan.

B. Perkotaan dalam Perspektif Islam

Kota dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup dimensi spasial dan teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, politik, dan spiritual.⁶⁶ Para pemikir Muslim klasik telah meletakkan dasar konseptual yang kuat tentang bagaimana kota seharusnya dibangun dan dikelola agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan mencapai kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*).⁶⁷ Pemikiran Islam klasik menunjukkan relevansi yang kuat, khususnya melalui kontribusi tokoh-tokoh Muslim yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.⁶⁸ Dalam konteks ini, pemikiran Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Azraq, dan Abu Al-Rabi’ memberikan fondasi

⁶⁵ Siahay et al., *Pengantar Perencanaan Kota*, 30.

⁶⁶ Muhamad, “Kota Dalam Perspektif Penafsiran Interdisiplin: Kajian Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibn ‘Ashur (1879-1973M)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 382.

⁶⁷ Muhammad, *Kota Al-Qur’an: Studi Kota Dari Perspektif Tafsir Interdisiplin* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

⁶⁸ Dinda Selvia and Mawardi Mawardi, “Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah Dan Relevansi Di Era Modern,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 4201–6, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>.

filosofis dan praktis yang dapat digunakan untuk menilai arah kota modern dari sudut pandang nilai-nilai Islam.

Al-Farabi dalam karyanya *al-Madinah al-Fāḍilah* menyebut kota sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Baginya, kota yang baik adalah kota yang penduduknya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu kebahagiaan hakiki. Kota ideal (kota utama) harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan, akhlak, dan kemampuan manajerial tinggi. Struktur sosial dalam kota juga harus disusun secara proporsional, di mana setiap individu melaksanakan fungsi dan perannya demi keseimbangan kolektif.⁶⁹ Ia juga mengaitkan kebersihan fisik kota dengan kebersihan moral masyarakatnya, dan menyebut pentingnya penataan ruang, saluran air, dan pembuangan limbah.⁷⁰ Gagasannya mencakup aspek pendidikan warga kota, peran pemimpin dalam menanamkan nilai-nilai, serta pentingnya etika dan tujuan spiritual dalam perencanaan wilayah kota.

Al-Mawardi dalam karyanya *al-Aḥkām as-Sultāniyyah* menekankan pentingnya peran otoritas negara dalam mengatur kehidupan kota secara adil dan efisien. Ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, masjid, pasar, serta dalam menjaga keteraturan dan keamanan. Al-Mawardi menekankan bahwa ruang publik harus dikelola demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok elite.⁷¹ Ia memperkenalkan konsep keadilan administratif, pengawasan ekonomi, dan pengelolaan ruang publik yang harus dijalankan dalam koridor hukum Islam.

Ibn Khaldun dalam karyanya *al-‘Ibar wa Dīwān al-Mubtada’ wa al-Khabar fī Ayyām al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa man ‘Āsharahum min dhawī as-Sultān al-Akbar* menggunakan pendekatan sosiologis-historis untuk menjelaskan dinamika kota. Ia mengemukakan bahwa kemajuan kota ditentukan oleh kekuatan

⁶⁹ Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah* (Mesir: Mathba’ah Mustafa Fahmi al-Kutubi, 1906).

⁷⁰ Atsir Ahmad Salman et al., “Al-Farabi’s Concept of Political Welfare,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 415–25.

⁷¹ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Kairo: Mathba’ah al-Sa’adah, 1909).

solidaritas sosial (*'aṣabiyyah*), stabilitas pemerintahan, dan kemakmuran ekonomi. Kota adalah pusat peradaban, tetapi juga tempat munculnya kemerosotan jika masyarakat kehilangan nilai kebersamaan dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa kejatuhan kota biasanya diawali oleh kemewahan berlebih, korupsi, dan lemahnya kepemimpinan.⁷² Pemikirannya mencakup indikator kekuatan sosial sebagai prasyarat kemajuan kota, dan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil.

Ibnu al-Azraq dalam karyanya *Keajaiban Tata Kelola Negara dan Hakikat Kekuasaan* banyak mengadopsi dan melanjutkan gagasan Ibn Khaldun, namun menambahkan dimensi tata ruang kekuasaan. Menurutnya, kota tidak hanya diatur oleh kekuasaan, tetapi juga oleh desain ruang yang merepresentasikan keadilan dan efektivitas administrasi. Ia berpendapat bahwa pusat pemerintahan harus dikelilingi oleh fasilitas pelayanan publik, pasar yang terawasi, serta kawasan pemukiman yang seimbang.⁷³ Ia menghubungkan antara struktur pemerintahan dan bentuk tata ruang kota, serta pentingnya peran geografis dalam menjaga stabilitas sosial.

Abi ar-Rabi' dalam pandangannya, kota merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang harus dirancang dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kehadiran sistem pengelolaan kota yang baik, termasuk pengaturan keuangan negara, keamanan kota, dan pelayanan masyarakat. Ar-Rabi' juga menekankan bahwa penguasa harus memperhatikan kebutuhan rakyat kecil dan memprioritaskan kebijakan pembangunan yang merata.⁷⁴

Akhirnya, nilai-nilai spiritual dan moral menjadi fondasi tak terpisahkan dalam konsep kota menurut para tokoh Muslim klasik. Bagi Al-Farabi, kota yang baik bukan hanya yang makmur secara ekonomi, tetapi juga yang mampu membina akhlak warganya. Oleh karena itu, kota ideal harus menyediakan ruang bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dan etika publik. Fasilitas ibadah, lembaga pendidikan moral, serta ruang-ruang sosial yang mendorong interaksi positif

⁷² Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, *Al-'Ibar Wa Diwan Al-Mubtada' Wa Al-Khabar Fi Ayyam Al-'Arab Wa Al-'Ajam Wa Al-Barbar Wa Man 'Asharahum Min Dzawi as-Sulthan Al-Akbar – Juz 1: Al-Muqaddimah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001).

⁷³ Abu 'Abd Allah Ibn Al-Azraq, *Keajaiban Tata Kelola Negara Dan Hakikat Kekuasaan* (Kairo: Dar al-Salam, 2008).

⁷⁴ Syihabuddin Ahmad bin Abi Ar-Rabi', *Suluk Al-Malik Fī Tadbir Al-Mamalik* (Kairo: Dar al-Sya'b, 1983).

antarmasyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas spiritual sebuah kota. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang digagas oleh para pemikir Muslim tersebut dapat digunakan sebagai kerangka konseptual perencanaan kota modern sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial dan Pemerataan Akses

Prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi menekankan pentingnya distribusi hak dan layanan publik secara merata.⁷⁵ Kota yang ideal adalah kota yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.⁷⁶

2. Kemaslahatan Umum sebagai Orientasi Tata Kota

Menurut Ibnu Al-Azraq, perencanaan kota harus diarahkan pada kemaslahatan kolektif, bukan hanya keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu.⁷⁷ Hal ini menuntut pengelolaan ruang kota yang berpihak pada kepentingan umum.

3. Keseimbangan dan Keteraturan Tata Ruang

Al-Farabi menggambarkan kota sebagai sistem sosial yang menuntut struktur ruang yang tertata dan fungsional.⁷⁸ Keseimbangan antara kawasan permukiman, perdagangan, pendidikan, dan ibadah menjadi syarat utama terciptanya kota yang terorganisasi.

4. Kepemimpinan Etis dan Partisipatif

Abu Al-Rabi' menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, jujur, dan responsif terhadap aspirasi warga.⁷⁹ Dalam perencanaan kota modern, prinsip ini relevan dengan tata kelola partisipatif yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan.

5. Keberlanjutan Ekologis dan Sosial

⁷⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*.

⁷⁶ Siti Rabbani Karimuna et al., *Kesehatan Lingkungan Pemukiman Dan Perkotaan* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021).

⁷⁷ Al-Azraq, *Keajaiban Tata Kelola Negara Dan Hakikat Kekuasaan*.

⁷⁸ Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*.

⁷⁹ Syihabuddin Ahmad bin Abi Ar-Rabi', *Suluk Al-Malik Fī Tadbir Al-Mamalik*.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perkembangan kota harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesinambungan sosial.⁸⁰ Kota yang terus berkembang tanpa memperhitungkan dampak ekologis akan mengalami kemunduran peradaban.

6. Integrasi Nilai Spiritual dan Moral

Al-Farabi dan Al-Mawardi melihat kota bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang pembinaan akhlak dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, spiritualitas menjadi dimensi penting dalam struktur kota yang ideal.⁸¹

C. Pemahaman Hadis

Dilihat dari perkembangannya, metode pemahaman hadis dapat dibagi ke dalam dua periode utama, yakni periode klasik dan periode modern.⁸² Pada periode klasik, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat positivistik, yaitu menitikberatkan pada aspek literal teks hadis. Fokus kajian pada masa ini meliputi analisis terhadap kontradiksi antar-matan (*mukhtalif al-ḥadīth*), pemaknaan lafaz asing (*gharīb al-ḥadīth*), serta aspek kesejarahan kemunculan hadis (*asbāb wurūd al-ḥadīth*). Sementara itu, pendekatan pada periode modern lebih bersifat konstruktivistik, yaitu melakukan rekonstruksi terhadap makna matan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peran Nabi sebagai penentu syariat (*al-tashrī*), penentu keputusan hukum (*al-qadā*), pendidik karakter (*ḥaml al-naḥs ‘alā akhlāq mahmūdah*), serta memperhatikan indikator sistematis baik dari aspek internal (teks matan) maupun eksternal (konteks di luar matan).

Meskipun telah banyak metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh para sarjana dan pengkaji hadis, persoalan tentang bagaimana memahami hadis secara tepat masih terus menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan antara corak pemahaman tekstualis dan kontekstualis, serta perbedaan pandangan antara pendekatan hermeneutik dan penolakannya. Berbagai dinamika tersebut

⁸⁰ Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, *Al-‘Ibar Wa Diwan Al-Mubtada’ Wa Al-Khabar Fi Ayyam Al-‘Arab Wa Al-‘Ajam Wa Al-Barbar Wa Man ‘Asharahum Min Dzawi as-Sulthan Al-Akbar – Juz 1: Al-Muqaddimah*.

⁸¹ Aziz Musbihin and Khusnul Khatimah, “Urban Sufism: Membangun Kecerdasan Spiritual Masyarakat Perkotaan Era Modern Melalui Pendekatan Transpersonal,” *Jousip: Journal of Sufism and Psychotherapy* 4, no. 1 (2024): 55–68, <https://doi.org/10.28918/jousip.v4i1.7670>.

⁸² Hasan Su’aidi, “Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Dalam Kitab Al-Turuk Al-Sahihah Fi Fahmi Al-Sunnah Al-Nabawiyyah” (2021).

menjadi faktor pendorong berkembangnya kajian kritis terhadap metodologi pemahaman hadis di era kontemporer.⁸³

1. Pengertian Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang memiliki beberapa makna, antara lain pengertian, pendapat atau aliran pandangan, serta kemampuan untuk mengerti atau tahu sesuatu dengan benar.⁸⁴ Kata “paham” juga menggambarkan kecerdasan dalam memahami suatu hal secara mendalam. Sedangkan pemahaman sendiri adalah suatu proses atau cara dalam melakukan tindakan memahami atau memahami sesuatu kepada orang lain. Dengan kata lain, pemahaman merupakan usaha seseorang untuk menangkap makna, menginterpretasikan informasi, serta menyerap pengetahuan sehingga dapat mengerti dan menguasai suatu hal secara benar dan menyeluruh.⁸⁵

Pemahaman dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *fiqh* (فقه), yang berasal dari kata kerja *faqiha-yafqahu-fiqhan*. Secara harfiah, *fiqh* berarti *al-‘ilmu bi al-shay’i wa al-fahmu lahu*, yaitu mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dengan demikian, *fiqh* tidak hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan mengerti sesuatu secara mendalam.⁸⁶ Al-Fairuz Abadi mendefinisikan pemahaman sebagai *al-‘ilmu bi al-shay’i wa al-fahmu lahu wa al-faṭānah, wa ghālibun ‘alā al-dīn li sharafih* yang berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik, disertai kecerdasan serta kemampuan mengamalkan agama karena kemuliaannya.⁸⁷ Definisi ini menekankan bahwa pemahaman tidak hanya sekadar mengetahui dan mengerti, tetapi juga melibatkan kecerdasan serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaannya.

⁸³ Su’aidi.

⁸⁴ Suryani Suryani, “Metode Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis,” *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik* 3, no. 3 (2022): 388–98, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=HWoYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sourc e:book+ibadah+zikir+dan+doa&ots=E8TKVr-6In&sig=iY3uUWsVXED_vIjsKHUhSEl4pBg.

⁸⁵ Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2017): 314–23, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>.

⁸⁶ Ibn Manzur, “Lisan Al-Arab,” in *Juz 9* (al-Qahirah: Dar al-Taufiqiyyah Li Turats, 2009), 339.

⁸⁷ Majd al-Din Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuz Abadi, “Al-Qamus Al-Muhith,” in *Juz 4* (Bairut: Dar al-Jail, n.d.), 291.

Menurut al-Jurjani, *al-fiqh* berarti memahami maksud orang yang berbicara dalam perkataannya (*fahm gharad al-mutakallim min kalāmihi*).⁸⁸ Sama halnya dengan Ibn Qayyim yang di kutip oleh Maizuddin menyatakan bahwa kata *fiqh* lebih spesifik dibandingkan *fahm*, karena *fiqh* berarti memahami maksud yang diinginkan oleh pembicara. Dengan kata lain, *fiqh* merupakan kemampuan yang lebih dari sekadar memahami lafaz atau kata-kata secara kebahasaan, melainkan menangkap makna dan maksud yang mendalam di balik pembicaraan tersebut.⁸⁹ Namun, dalam penggunaan khusus, kata *fiqh* telah menjadi istilah eksklusif yang menunjuk pada salah satu disiplin ilmu keislaman, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum *syara* 'secara praktis yang ditarik (diistinbatkan) dari dalil-dalil yang terperinci. Hal ini wajar karena meskipun kedua kata tersebut sama-sama bermakna memahami, kata *fiqh* lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam. Meski demikian, dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan kata *fiqh* adalah makna dasarnya secara bahasa, yaitu pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu, bukan pengertian *fiqh* sebagai ilmu hukum Islam yang spesifik.⁹⁰

Pemahaman hadis sering disebut dengan istilah *fiqh al-ḥadis*, yang menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan keilmuan hadis dan fikih, atau setidaknya menghilangkan kesan dikotomis antara kedua disiplin ilmu tersebut. Dengan demikian, *fiqh al-ḥadis* berperan sebagai jembatan yang menyatukan pemahaman terhadap teks hadis sekaligus penerapan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada pemahaman hadis antara lain '*ilm ma'ānī al-ḥadīth* (ilmu makna hadis), *syarḥ al-ḥadīth* (penjelasan hadis), *tafsir al-ḥadis* (penafsiran hadis), dan *mā yustafādu min al-ḥadīth* (apa yang diambil manfaatnya dari hadis). Semua istilah ini menggambarkan proses memahami dan mengkaji hadis secara mendalam agar dapat diaplikasikan secara tepat.⁹¹

⁸⁸ Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, n.d.).

⁸⁹ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008).

⁹⁰ Maizuddin.

⁹¹ Andi Rahman, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Hadis* (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023).

2. Prinsip Memahami Hadis

Memahami hadis tidak hanya sebatas mengetahui kandungan, maksud, dan tujuannya, tetapi juga merupakan upaya mengaktualisasikan ajaran agama dalam konteks kekinian yang kemudian berupaya menggali spirit atau esensi yang terkandung di dalamnya.⁹² Sejumlah ulama, baik dari era klasik maupun kontemporer, telah menghasilkan berbagai karya yang membahas tata cara memahami hadis dengan corak dan karakteristik yang beragam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Syafi'i

Dalam kitabnya *Ikhtilaful Hadis*, Imam Syafi'i menekankan empat aspek utama dalam memahami hadis, yaitu: pemilahan antara umum dan khusus (*'amm dan khas*), kedudukan hadis ahad, otoritas sunnah sebagai hujjah, serta konsep *nasakh-mansukh*. Imam Syafi'i banyak menerapkan pendekatan kontekstual dalam memahami hadis, terutama untuk mengatasi kontradiksi makna yang tampak di permukaan. Ia berpandangan bahwa adanya pertentangan makna dalam hadis sulit diterima, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan seperti *nasakh, tarjih*, atau kompromi. Salah satu bentuk kompromi tersebut adalah dengan menelusuri konteks atau *sabab al-wurud* hadis sebagai landasan pemahaman.⁹³

b. Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi dalam karyanya kitab *kayfa nata 'āmalu ma'a al-sunnah al-nabawīyyah: ma'ālim wa dawābiṭ* mengemukakan lima metode khusus dalam memahami hadis yang menjadi karakteristik sunnah Nabi,⁹⁴ yaitu: Metode Komprehensif (*al-Manhaj al-shumūlī / المنهج الشمولي*), Metode Integratif (*al-Manhaj al-Takāmūlī / المنهج التكاملي*), Metode Meringankan (*al-Manhaj al-Muyassar / المنهج الميسر*).

⁹² Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 93–104.

⁹³ Ahmad Syahrani, "Pembahasan Metode Pemahaman Hadis Imam Syafi'i," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2019): 1–16.

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Kayfa Nata 'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawīyyah*, ed. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 92–93.

(الميسر), Metode Proporsional dan Seimbang (*al-Manhaj al-Mutawazin* / المنهج المتوازن), Metode Realistik dan Efisien (*al-Manhaj al-Waqi'i* / المنهج الواقعي).⁹⁵

Selain itu beliau juga menggagas delapan metode atau langkah-langkah memahami hadis dengan baik dan benar.⁹⁶ yaitu mulai dari: (1) memahami hadis sesuai petunjuk al-Quran; (2) menghimpun hadis-hadis yang setema; (3) menggabungkan atau mentarjih hadis-hadis yang tampaknya kontradiktif atau bertentangan secara zahir; (4) memahami hadis sesuai latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya; (5) membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap; (6) membedakan antara ungkapan haqiqah dan majaz; (7) membedakan antara hadis yang gaib dengan yang nyata; dan yang terakhir (8) memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.⁹⁷

c. Menurut Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali dalam karyanya *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-Hadis* mengatakan bahwa pemahaman terhadap hadis perlu diukur berdasarkan empat standar keşahīhan matan hadis, yaitu: matan hadis harus sesuai dengan al-Qur'an, matan hadis harus sesuai dengan hadis şahīh lainnya, matan hadis harus sesuai dengan fakta historis, dan terakhir matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah.⁹⁸ Baik dalam pemahaman maupun penilaian kesahihan, al-Ghazali menempatkan al-Qur'an sebagai standar utama. Menurutnya, al-Qur'an berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menentukan hadis yang dapat diterima, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hadis yang tidak selaras dengan al-Qur'an harus ditinggalkan, meskipun sanadnya sahih.⁹⁹ Sama halnya dengan Yusuf

⁹⁵ Wahyuni Nuryatul Choirah and Munawir Munawir, "Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf Al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik," *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 65, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22817>.

⁹⁶ Hablun Ilhami, "Metode Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 104–16.

⁹⁷ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyyah* Terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), 92–93.

⁹⁸ Didi Suardi, "Metode Pemahaman Hadis Menurut Muhammad Al-Ghazali," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 1 (2021): 105–19, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.104>.

⁹⁹ Mukhlis Mukhtar, "Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fikih Seputar Sunnah Nabi: Studi Kritis Atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2011): 81–92.

Qardhawi, Muhammad al-Ghazali ini termasuk pemikir kontekstual, hanya saja Yusuf Qardhawi cenderung tradisional sedangkan al-Ghazali cenderung liberal.¹⁰⁰

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa kritik terhadap Muhammad al-Ghazali muncul karena dua alasan utama. Pertama, al-Ghazali menolak penggunaan hadis ahad dalam penetapan akidah, karena menurutnya, akidah harus bersandar pada keyakinan yang pasti, bukan dugaan, sehingga hanya hadis mutawatir yang dapat dijadikan dasar. Kedua, ia menolak beberapa hadis ahad yang dinilai bertentangan dengan al-Qur'an, logika ilmiah, dan fakta sejarah. Meskipun secara umum sejalan dengan para ulama hadis dalam menentukan kriteria kesahihan, al-Ghazali lebih menekankan bahwa matan hadis harus sejalan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Karena itu, ia menolak sebagian hadis sahih yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani dan perkembangan zaman.¹⁰¹

d. Menurut Syuhudi Ismail

Syuhudi Ismail dalam karyanya *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual*, menjelaskan bahwa apabila sebuah hadis yang setelah dikaji secara mendalam dan dihubungkan dengan latar belakang kemunculannya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan bunyi teksnya, maka hadis tersebut lebih tepat dipahami secara tekstual (tersurat). Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pengkajian yang mendalam ditemukan petunjuk kuat di balik teks tersebut yang mengharuskan pemaknaan dan penerapannya tidak sesuai dengan makna literalnya, maka hadis tersebut sebaiknya dipahami secara kontekstual.¹⁰²

Selanjutnya Syuhudi Ismail menegaskan pemahaman hadis yang tepat dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Oleh karena itu, setiap hadis perlu dianalisis melalui empat sudut pandang, yaitu:¹⁰³

- 1) Dari bentuk matan hadis Nabi dan cakupan petunjuknya yang meliputi apakah ia berbentuk *jawami' al-kalim*, *bahasa tamsil*, *ungkapan simbolik*, *bahasa percakapan* dan *ungkapan analogi*.

¹⁰⁰ Fakhurrozi, "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer: Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Yusuf Al-Qardawi," *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.14>.

¹⁰¹ Suardi, "Metode Pemahaman Hadis Menurut Muhammad Al-Ghazali."

¹⁰² Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Teksual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

¹⁰³ Ismail, 9–48.

- 2) Dari kandungan hadis yang dikaitkan dengan fungsi Nabi. Dalam hal ini, Syuhudi merujuk pada pandangan al-Qarafi, seorang ulama mazhab Maliki abad ketujuh hijriyah yang membagi fungsi Nabi menjadi tiga: (1) sebagai penyampai risalah, sehingga perkataannya dalam kapasitas ini bersifat hukum universal; (2) sebagai pemimpin, di mana tindakannya tidak boleh diikuti kecuali atas izin pemimpin; dan (3) sebagai hakim, di mana tindakannya hanya dapat dilakukan atas perintah hakim.
- 3) Dari latar belakang historis kemunculan hadis, yang dapat dibedakan menjadi hadis tanpa sebab khusus, hadis dengan sebab khusus, dan hadis yang berkaitan dengan situasi tertentu.
- 4) Dari petunjuk hadis nabi yang tampak bertentangan, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui *kompromi, tarjih, naskh, dan tawaqquf*.¹⁰⁴

Struktur pemikiran Syuhudi Ismail dalam memahami hadis menekankan analisis teks dan konteks secara kuat. Hal ini tampak dari langkah-langkah yang ia tempuh dalam memahami hadis, di antaranya: *pertama*, melakukan analisis teks; *kedua*, mengidentifikasi konteks historis kemunculan hadis; dan *ketiga*, melakukan kontekstualisasi hadis.¹⁰⁵

e. Menurut Ali Mustafa Yaqub

Secara umum, kerangka pemahaman hadis menurut Ali Mustafa Yaqub terbagi menjadi dua pendekatan utama: (1) pendekatan tekstual, yang diterapkan khususnya pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan *ibadah mahdhah* (ibadah murni); serta (2) pendekatan kontekstual, yaitu memahami hadis dengan memperhatikan berbagai faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, seperti *asbab al-wurud* (latar belakang historis hadis), dimensi ruang dan waktu (konteks lokal dan temporal), unsur kausalitas (*'illat al-kalam*), serta kondisi sosial dan budaya masyarakat saat itu (*taqalid*).¹⁰⁶

¹⁰⁴ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis, Ilmu Hadis Press* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017).

¹⁰⁵ Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis."

¹⁰⁶ Miski, "Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub: Studi Atas Fatwa Pengharaman Serban Dalam Konteks Indonesia," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2016): 15–31, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1625>.

Ali Mustafa Yaqub juga mengklasifikasikan metode pemahaman hadis ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: *fahm al-lafzi* (analisis terhadap redaksi atau teks hadis), *al-fahmu al-ma'nawi* (pendekatan kontekstual terhadap makna), dan *al-fahmu al-lafzi wa al-ma'nawi* (pendekatan gabungan antara teks dan konteks). Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah pemahaman terhadap *mantuq al-hadis* (makna eksplisit) dan *mafhum al-hadis* (makna implisit), atau antara *dalalah ta'abbudiyyah* (makna normatif-ibadah) dan *dalalah ta'aqliyyah* (makna rasional). Dalam kajian teks, aspek penting yang diperhatikan adalah kemungkinan penggunaan *majaz* (makna kiasan), *ta'wil*, *'illat* hukum, penyatuan makna, serta perbedaan atau pertentangan antar hadis (*ikhtilaf al-hadis*). Sementara dalam pemahaman maknawi (kontekstual), perlu diperhatikan latar belakang kemunculan hadis (*asbab wurud al-hadis*), kondisi geografis, kebudayaan, serta struktur sosial masyarakat Arab ketika hadis itu muncul.¹⁰⁷

f. Menurut Maizuddin

Maizuddin dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Pemahaman Hadis*, mengelompokkan pendekatan dalam memahami hadis ke dalam empat kategori utama, yaitu: pendekatan tekstual, kontekstual, tematis, dan opsional.

- 1) Pendekatan tekstual mencakup tiga bentuk analisis, yaitu pendekatan kebahasaan (linguistik), pendekatan ushul fikih, dan pendekatan *ta'wil* terhadap makna hadis.
- 2) Pendekatan kontekstual berupaya memahami hadis dengan mempertimbangkan konteksnya secara menyeluruh, termasuk konteks redaksional, latar historis, aspek sosiologis dan antropologis, posisi Nabi ketika menyampaikan hadis, siapa yang menjadi lawan bicaranya, serta dimensi ruang dan usaha untuk menyesuaikannya dengan kondisi kekinian.
- 3) Pendekatan tematis dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema tertentu untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh.
- 4) Pendekatan opsional diterapkan ketika terdapat dua hadis yang tampak bertentangan dan tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Dalam konteks

¹⁰⁷ Su'aidi, "Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub Dalam Kitab Al-Turuk Al-Sahihah Fi Fahmi Al-Sunnah Al-Nabawiyyah."

perbedaan redaksi atau variasi praktik ibadah, digunakan pendekatan *tanawwu' al-'ibadah* (keragaman bentuk ibadah). Walaupun pendekatan ini menerima keberagaman dalam praktik atau bacaan ibadah, tetap ada kecenderungan untuk menguatkan salah satu hadis yang dianggap lebih utama. Di samping itu, pendekatan *tarjih* (menguatkan salah satu hadis) dan *naskh* (penghapusan hukum sebelumnya) juga menjadi bagian dari alternatif solusi ketika terjadi pertentangan antar hadis.¹⁰⁸

Dengan demikian, keempat pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh, sistematis, dan relevan terhadap konteks sosial dan praktis. Selain itu masing-masing pendekatan memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan analisis.

g. Menurut Arifuddin Ahmad

Arifuddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, menawarkan sejumlah prinsip penting dalam memahami hadis, yang dirumuskan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: interpretasi tekstual, interpretasi intertekstual, dan interpretasi kontekstual.

1) Interpretasi Tekstual

Pendekatan ini berfokus pada teks hadis itu sendiri tanpa banyak mempertimbangkan konteks historis kemunculannya atau dalil lainnya. Ada tiga aspek penting yang ditekankan: Pertama, dari sisi teknik periwayatan, hadis dapat dikaji dari keutuhan riwayatnya (apakah lengkap/*tamm* atau tidak lengkap/*naqis*) serta dari segi perbedaan redaksi (lafal) dan makna, sehingga pengumpulan berbagai versi riwayat bisa menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut sebenarnya merujuk pada satu peristiwa yang sama. Kedua, dari gaya bahasa, Nabi menggunakan bahasa yang terstruktur dan efektif. Namun, dalam kondisi tertentu, beliau juga menyesuaikan dialek agar bisa dipahami oleh pendengarnya. Dalam menyampaikan makna, Nabi kerap menggunakan pengulangan, analogi, perbandingan, simbol, dan praktik langsung. Ketiga, dari sisi keragaman isi, hadis mencakup berbagai tema seperti akidah, ibadah, dan akhlak.

¹⁰⁸ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*.

2) Interpretasi Intertekstual

Metode ini memaknai teks hadis dengan mempertimbangkan hubungan antar teks, baik dalam satu hadis maupun dengan hadis atau ayat lain. Pendekatan ini menuntut penggunaan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner atau multidisipliner). Tujuannya adalah untuk menegaskan makna formal dan menggali makna substantif. Aplikasinya mencakup: memahami sistematika matan hadis, mengaitkan hadis yang satu dengan hadis lain yang semakna, menghubungkan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk memahami fungsi hadis sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Qur'an, baik dalam bentuk tafsir, penguatan, maupun legislasi dan penghapusan hukum (*naskh*).

3) Interpretasi Kontekstual

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami latar belakang historis hadis (*asbab al-wurud*), termasuk pelaku dan peristiwa sejarah, serta konteks waktu dan tempat kemunculannya. Di samping itu, juga perlu diperhatikan konteks masa kini agar hadis tetap relevan. Arifuddin Ahmad menyarankan penggunaan pendekatan holistik dan multidisipliner seperti sejarah, sosiologi, hermeneutika, semiotika, dan lainnya. Aplikasinya mencakup: menelaah ada tidaknya sebab wurud, memperhatikan posisi dan otoritas Nabi ketika menyampaikan hadis, memahami latar belakang sosial-budaya para sahabat, menelusuri bentuk periwayatan, serta memperhatikan aspek ruang, waktu, dan dinamika peradaban.¹⁰⁹

Secara umum, pemahaman hadis menurut beberapa pakar dapat dirumuskan ke dalam sejumlah prinsip penting berikut:¹¹⁰

1. Prinsip Konfirmatif. Setiap makna hadis harus selalu dikonfirmasi dengan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama. Hal ini penting karena hadis berperan sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Qur'an, bukan berdiri sendiri.¹¹¹

¹⁰⁹ Marhani Malik and Muh. Yusuf Pawellangi, "Metodologi Ilmu Hadis: Suatu Analisis Pemikiran Arifuddin Ahmad Tentang Metodologi Pemahaman Hadis," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2021): 52–69, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i2.22967>.

¹¹⁰ Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, 7–10.

¹¹¹ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

2. Prinsip Tematis-Komprehensif. Hadis tidak boleh dipahami secara parsial atau terpisah. Untuk memahami satu hadis secara utuh, harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang bertema serupa agar makna yang diperoleh bersifat menyeluruh dan tidak menyimpang.¹¹²
3. Prinsip Kebahasaan. Karena hadis disampaikan dalam bahasa Arab, maka pemahaman terhadap hadis harus berlandaskan kaidah kebahasaan Arab, baik dari aspek gramatikal, struktur kalimat, maupun makna semantiknya dalam konteks budaya Arab.¹¹³
4. Prinsip Historis. Memahami hadis harus memperhatikan latar belakang sejarahnya, termasuk kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, konteks khusus munculnya hadis, serta peran Nabi saat menyampaikannya, apakah sebagai pemimpin, hakim, sahabat, atau guru.¹¹⁴
5. Prinsip Realistis. Selain memahami masa lalu, penafsir juga perlu mempertimbangkan kondisi aktual umat Islam hari ini. Ini berarti penafsiran hadis harus relevan dengan problematika sosial dan kehidupan nyata umat Muslim kontemporer.¹¹⁵
6. Prinsip Pembedaan antara Etis dan Legalitas. Hadis tidak semata-mata berisi hukum formal (legal), tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang lebih mendalam. Seorang penafsir harus mampu membedakan keduanya agar tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi mampu menggali pesan moral yang ingin disampaikan Nabi.¹¹⁶
7. Prinsip Pembedaan antara Instrumen dan intensional. Hadis memiliki dua dimensi: instrumental (cara) yang bersifat temporer dan kontekstual, serta intensional (tujuan) yang bersifat universal dan permanen. Dalam memahami

¹¹² Abdul Aziz, *Abdul Aziz, Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr, Abdi Fama* (Bogor: Abi Fama, 2023), 57.

¹¹³ Mohammad Jailani, Jannatul Husna, and Nur Kholis, "Membedah Hermeneutika Perspektif Ilmuan Muslim Modern: Korelasinya Dalam Studi Ilmu Hadis," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 211–32, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3028>.

¹¹⁴ Aziz, *Abdul Aziz, Metode Tafsir Tematik Fazlur Rahman Dan Muhammad Baqir Al-Shadr*, 97.

¹¹⁵ Aziz, 126.

¹¹⁶ Abdul Jabal Idharudin, Muwahidah Nurhasanah, and Samsuddin, "Interpretasi Hadis Perspektif Fazlur Rahman Dan Relevansinya Terhadap Studi Islam Kontemporer," *Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2025): 582–93.

hadis, penekanan utama harus diarahkan pada tujuan inti dari sabda Nabi, sementara metode atau caranya bisa berubah sesuai konteks zaman dan masyarakat.¹¹⁷

Dari keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun metode pemahaman hadis yang bersifat sempurna dan final. Oleh karena itu, kurang tepat jika ada pihak yang mengklaim bahwa metodenya adalah yang paling benar. Suatu metode mungkin efektif untuk memahami hadis dalam konteks tertentu, namun kurang sesuai jika diterapkan pada konteks yang berbeda. Artinya, pemilihan metode sangat bergantung pada teks (nash) dan konteksnya. Dalam praktiknya, pemahaman hadis tidak cukup hanya mengandalkan ilmu hadis dan disiplin keislaman lainnya, tetapi perlu pula didialogkan dengan ilmu-ilmu modern, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan linguistik. Pendekatan kontekstual terhadap hadis Nabi merupakan keniscayaan di masa kini maupun mendatang, karena upaya kontekstualisasi menjadikan ajaran Islam bersifat fleksibel, adaptif, dan rasional sesuai prinsip *shalih li kulli zaman wa makan*. Meski demikian, kontekstualisasi harus dilakukan secara hati-hati, sebab tidak semua hadis dapat dipahami secara kontekstual, terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hal-hal gaib. Proses ini juga perlu mempertimbangkan dimensi universal, lokal, dan partikular sesuai situasi dan kondisi yang ada.¹¹⁸

3. Metode Pemahaman Hadis

Khazanah keilmuan hadis mencatat bahwa para ulama telah mengembangkan beragam cara atau metode dalam mengkaji dan memahami sabda Nabi saw agar maknanya tersampaikan secara akurat serta relevan dengan konteks. Di antara metode yang paling umum dijadikan rujukan adalah metode *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'i*, dan *muqarin*. Masing-masing metode ini memiliki fokus serta tujuan

¹¹⁷ Idharudin, Nurhasanah, and Samsuddin.

¹¹⁸ Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali," *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 75–102, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>.

yang berbeda, sehingga menawarkan variasi perspektif atau ragam sudut pandang dalam memahami kandungan hadis.¹¹⁹

a. Metode *Tahlili*

Metode *tahlili* merupakan pendekatan dalam menjelaskan hadis Nabi dengan cara menguraikan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh. Dalam metode ini, seorang pensyarah tidak hanya memaparkan makna *lafziyah* dari hadis, tetapi juga menjelaskan makna secara kontekstual sesuai dengan keahlian dan latar belakang keilmuannya. Metode ini memiliki ciri-ciri: 1) menguraikan kandungan hadis secara komprehensif dan menyeluruh; 2) menjelaskan makna hadis secara berurutan, dimulai dari kata per kata, kalimat per kalimat; 3) memaparkan *sabab al-wurud* jika tersedia; 4) menyertakan pandangan sahabat, tabi'in, dan ulama dari berbagai disiplin ilmu; 5) menerangkan hubungan antar hadis (*munasabah*); 6) Terkadang dipengaruhi oleh mazhab tertentu, sehingga menghasilkan beragam corak syarah seperti fiqh, kalam, atau tasawuf.¹²⁰ Beberapa kitab syarah hadis terkemuka seperti *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani (penjelasan atas *Ṣaḥīḥ* Bukhari) dan *Al-Minhaj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Imam Nawawi merupakan contoh dari penerapan metode *tahlili* dalam menjelaskan hadis secara mendalam.¹²¹

Penerapan metode *tahlili* dalam kajian hadis dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, takhrij hadis, yaitu usaha untuk menelusuri asal-usul hadis dari sumber-sumber primer. Kedua, analisis sanad, yang mencakup identifikasi setiap perawi dalam rantai transmisi, serta pengkajian latar belakang mereka melalui literatur seperti *Tahdzib al-Kamal* atau *Siyar A'lam al-Nubala'* guna menilai kredibilitas dan ketepatan hafalan mereka, serta mendeteksi kemungkinan adanya cacat sanad seperti tadlis atau inqitha'. Ketiga, kritik terhadap matan, yang meliputi penjabaran kosa kata (*mufradat*), pemahaman makna secara menyeluruh, konteks historis kemunculan hadis (*asbab al-wurud*), kandungan hukum dan nilai

¹¹⁹ Amru Rijal, Muhammad Tasbih, and Zaenab, "Aplikasi Metode Tahlili, Ijmali, Dan Maudhu'i (Tematik)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 797–803.

¹²⁰ Benny Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis," *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i1.324>.

¹²¹ Rijal, Tasbih, and Zaenab, "Aplikasi Metode Tahlili, Ijmali, Dan Maudhu'i (Tematik)."

hikmah, keterkaitan hadis dengan dalil lain, serta pandangan dari berbagai ulama terkait makna yang dikandung hadis tersebut.¹²²

Metode *tahlili* memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sangat bernilai dalam studi hadis. Salah satunya adalah kedalaman analisis yang dihasilkan. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu menggali makna hadis secara menyeluruh, sehingga setiap detail dari teks hadis dapat dipahami dengan seksama. Metode ini juga sangat tepat digunakan dalam menggali aspek hukum syariat, fikih, maupun akidah, karena memberikan akurasi yang tinggi dalam penarikan kesimpulan hukum dari hadis. Selain itu, metode *tahlili* menuntut peneliti untuk melakukan kajian sanad dan matan secara mendalam, yang sekaligus memperkuat penguasaan terhadap ilmu-ilmu seperti *rijalul hadis*, *jarh wa ta'dil*, serta kajian terhadap kecacatan hadis (*'ilal al-hadis*). Di samping itu, metode ini memungkinkan peneliti menjelaskan latar belakang historis turunnya hadis (*asbab al-wurud*), yang sangat penting dalam menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna.¹²³

Namun demikian, metode ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Proses kajiannya yang sangat rinci menuntut waktu, energi, serta tingkat keahlian yang tinggi, sehingga tidak selalu efisien bagi peneliti dengan keterbatasan sumber daya. Fokusnya yang sempit, yakni pada satu atau beberapa hadis, membuat metode ini kurang mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap suatu tema yang memerlukan pendekatan lebih luas. Hal ini juga membuat metode *tahlili* kurang efektif bila digunakan untuk mengkaji isu-isu kontemporer yang kompleks dan menuntut pengumpulan berbagai hadis terkait. Terlebih lagi, kecenderungan terlalu fokus pada rincian kadang membuat peneliti kehilangan pandangan menyeluruh (*big picture*), sehingga hubungan antara hadis yang sedang dikaji dengan hadis-hadis lain yang relevan bisa terabaikan.¹²⁴

b. Metode *Ijmali*

¹²² Rijal, Tasbih, and Zaenab.

¹²³ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

¹²⁴ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

Metode *ijmali* atau metode pemahaman hadis secara global merupakan pendekatan yang menjelaskan hadis-hadis berdasarkan urutan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama, seperti yang ada dalam *al-Kutub al-Sittah*. Penjelasan dilakukan secara ringkas, namun tetap mampu menyampaikan makna literal hadis dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Fokus utama metode ini adalah menyampaikan inti sari dari hadis, termasuk nilai-nilai moral dan pesan-pesan utama yang terkandung di dalamnya. Penyampaian makna dilakukan secara singkat dan langsung kepada pokok persoalan, tanpa terlalu banyak rincian teknis atau pembahasan ilmiah yang mendalam.¹²⁵ Karakter semacam ini membuat metode *ijmali* sangat cocok digunakan dalam konteks dakwah, ceramah umum, kajian singkat, atau dalam buku-buku hadis yang ditujukan bagi kalangan pemula atau masyarakat awam. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang isi hadis tanpa membebani pembaca atau pendengar dengan istilah teknis, perdebatan hukum, atau rincian akademik yang rumit. Contoh kitab yang menerapkan metode ini bisa dilihat pada beberapa ringkasan hadis atau kitab hadis yang disusun untuk tujuan dakwah dan pendidikan dasar.¹²⁶

Penerapan metode *ijmali* dalam memahami hadis dilakukan melalui beberapa langkah yang sederhana namun bermakna. Pertama-tama, hadis dibacakan dengan jelas agar maknanya tersampaikan secara utuh. Setelah itu, dijelaskan makna umum dari hadis tersebut secara ringkas, misalnya bahwa inti pesan hadis adalah pentingnya nasihat dalam Islam yang menunjukkan kepedulian dan keinginan baik terhadap sesama. Selanjutnya, dijelaskan secara global kepada siapa saja nasihat itu ditujukan, yaitu kepada Allah dengan mentauhidkan dan menaati-Nya, kepada Kitab-Nya dengan meyakini dan mengamalkannya, kepada Rasul-Nya dengan mengikuti sunahnya, kepada pemimpin dengan menaati selama tidak dalam kemaksiatan, dan kepada seluruh umat Islam melalui saling menasihati dalam kebaikan. Terakhir, ditegaskan nilai moral dari hadis ini, yakni mendorong umat Islam untuk menjadi pribadi yang peduli dan menjauhi sikap egois, karena Islam mengajarkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Dalam pendekatan ini,

¹²⁵ Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis."

¹²⁶ Rijal, Tasbih, and Zaenab, "Aplikasi Metode Tahlili, Ijmali, Dan Maudhu'i (Tematik)."

pembahasan teknis seperti sanad, redaksi, atau perdebatan hukum tidak dikedepankan, karena fokusnya adalah penyampaian makna inti secara mudah dan singkat.¹²⁷

Metode *ijmali* atau global dalam memahami hadis memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya efektif dalam konteks tertentu. Salah satu kelebihanannya adalah efisiensi waktu, karena metode ini memungkinkan pemahaman hadis secara cepat dan menyeluruh tanpa harus melalui kajian mendalam. Pendekatan ini sangat cocok untuk pembelajaran awal, dakwah, atau pengajaran dasar, karena penjelasannya yang ringkas, lugas, dan mudah dipahami, terutama oleh kalangan awam atau pemula yang belum memiliki latar belakang ilmu hadis. Selain itu, metode *ijmali* bersifat praktis, sehingga sering digunakan dalam ceramah umum, buku saku, atau pengajian singkat. Pendekatan yang ringan ini juga mampu membangkitkan minat dan motivasi awal untuk mempelajari hadis lebih lanjut, tanpa menimbulkan beban kognitif yang berat. Namun demikian, metode ini memiliki sejumlah keterbatasan. Karena penjelasannya bersifat umum dan ringkas, maka pemahaman yang dihasilkan cenderung kurang mendalam. Nuansa penting dalam teks hadis bisa saja terlewat, sehingga berisiko menimbulkan penyederhanaan makna yang berlebihan, bahkan salah tafsir apabila tidak dilengkapi dengan sumber-sumber pendukung. Metode ini juga tidak memadai untuk keperluan riset ilmiah yang memerlukan verifikasi sanad, analisis matan, serta pendalaman terhadap perbedaan pendapat ulama. Di samping itu, pendekatan ini tidak memberikan pembekalan teknis yang memadai kepada pembaca untuk memahami metodologi keilmuan hadis secara utuh.¹²⁸

c. Metode *Maudhu'i*

Metode *maudhu'i* (tematik) merupakan pendekatan yang paling menyeluruh dalam memahami suatu persoalan melalui perspektif hadis. Berasal dari kata *maudhu'* yang berarti tema atau topik, metode ini menekankan pada pengumpulan seluruh hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, lalu dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap isu

¹²⁷ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

¹²⁸ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

tersebut. Tidak seperti metode *tahlili* yang berfokus pada satu hadis, pendekatan ini berusaha menginventarisasi berbagai hadis relevan dari beragam sumber, meskipun tersebar di kitab-kitab dan bab yang berbeda. Setelah terkumpul, hadis-hadis tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sub-sub tema, dianalisis dari berbagai perspektif, serta dicermati hubungan antara hadis-hadis yang saling menguatkan (*syahid atau mutaba'ah*), atau yang tampak kontradiktif, untuk kemudian diselaraskan melalui metode *jam'u wa taufiq* atau *tarjih*.¹²⁹

Proses ini mencakup beberapa langkah utama, dimulai dari penentuan tema, dilanjutkan dengan pencarian hadis-hadis terkait menggunakan kata kunci tertentu melalui indeks tematik (*mu'jam*) atau perangkat lunak hadis, lalu dilakukan klasifikasi dan verifikasi sanad untuk menilai tingkat keotentikannya. Setelah itu, barulah dilakukan analisis dan sintesis guna mendapatkan pemahaman secara menyeluruh, dan terakhir merumuskan kesimpulan. Metode *maudhu'i* sangat relevan digunakan dalam menjawab isu-isu kontemporer dan dalam penyusunan fikih tematik, karena mampu memberikan pemahaman yang terstruktur dan komprehensif dari seluruh spektrum hadis yang tersedia terkait suatu topik.¹³⁰

Metode *maudhu'i* atau tematik dalam kajian hadis menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif untuk memahami suatu isu melalui pengumpulan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh hadis yang relevan. Kelebihan utamanya terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis terhadap satu tema, menyatukan makna dari berbagai hadis yang tersebar, menyelesaikan potensi kontradiksi antar hadis, serta menjawab kebutuhan zaman melalui pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Metode ini juga fleksibel karena dapat dipadukan dengan metode lain seperti *tahlili* untuk meningkatkan akurasi. Namun demikian, pendekatan ini menuntut penguasaan literatur hadis yang sangat luas, ketelitian tinggi dalam klasifikasi dan validasi sanad, serta sikap objektif dalam interpretasi agar tidak terjebak pada generalisasi berlebihan atau kehilangan konteks dari masing-masing hadis. Dengan demikian, meskipun menuntut kerja ilmiah yang intensif, metode *maudhu'i* tetap menjadi pilihan yang strategis dan

¹²⁹ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

¹³⁰ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

relevan, terutama dalam menjawab persoalan tematik dan kontemporer dalam khazanah keilmuan Islam.¹³¹

d. Metode *Muqarin*

Metode *muqarin* dalam kajian hadis merupakan pendekatan yang menekankan pada perbandingan, baik antara hadis dengan hadis lain yang memiliki redaksi atau konteks serupa, maupun antara pendapat para ulama dalam mensyarah hadis tersebut. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggali makna yang lebih dalam, memahami perbedaan redaksi atau makna, serta menemukan sintesis dari berbagai pandangan yang ada. Ciri khas dari metode ini adalah sifat analitis-komparatif, di mana pembacaan hadis dilakukan dengan membandingkan redaksi, susunan kata, dan kandungan makna dalam berbagai riwayat yang mungkin membahas kasus yang sama atau berbeda, tetapi dengan lafaz yang mirip. Selain itu, metode ini juga melibatkan kajian terhadap ragam pendapat para pensyarah hadis, baik dalam memahami makna maupun dalam menjelaskan hubungan antara hadis-hadis tersebut. Langkah penerapannya dimulai dengan mengidentifikasi hadis-hadis yang memiliki kemiripan lafaz, lalu memperbandingkan secara tekstual maupun kontekstual, mengkaji variasi makna yang muncul dari perbedaan tersebut, serta mengkaji pendapat-pendapat ulama yang menafsirkan hadis-hadis terkait. Dengan demikian, metode *muqarin* tidak hanya membuka wawasan terhadap keragaman dalam tradisi periwayatan dan pemahaman hadis, tetapi juga memberikan ruang bagi sintesis pemikiran yang lebih kaya dan objektif.¹³²

Metode *muqarin* dalam kajian hadis memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya sangat berharga dalam studi komparatif. Pertama, metode ini memberikan wawasan yang luas kepada pembaca karena mengungkap berbagai ragam pemahaman terhadap satu hadis, baik dari sisi redaksi maupun penafsiran para ulama. Kedua, ia membentuk sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, karena pembaca dibiasakan melihat keberagaman perspektif ulama dalam memahami satu teks. Ketiga, metode ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui spektrum pandangan terhadap suatu hadis, termasuk ragam penafsiran

¹³¹ Rijal, Tasbih, and Zaenab.

¹³² Kurniawan, "Metodologi Memahami Hadis."

dari para pensyarah klasik hingga kontemporer. Keempat, metode ini mendorong para peneliti dan pensyarah untuk aktif mengkaji lebih dalam, baik terhadap berbagai riwayat hadis maupun terhadap pandangan ulama lain, sehingga menghasilkan analisis yang lebih matang dan obyektif.¹³³

Namun demikian, metode *muqarin* juga memiliki beberapa kekurangan. Karena pembahasannya sangat luas dan kompleks, metode ini kurang cocok untuk pembaca pemula yang membutuhkan pemahaman sederhana dan langsung. Selain itu, metode ini kurang efektif dalam menjawab masalah sosial aktual, karena fokus utamanya adalah pada eksplorasi perbandingan, bukan pada solusi praktis. Kekurangan lainnya adalah kecenderungan metode ini untuk menelusuri pendapat-pendapat lama tanpa selalu memberikan kontribusi baru, sehingga kadang-kadang lebih deskriptif daripada solutif atau inovatif. Oleh karena itu, metode *muqarin* lebih tepat digunakan dalam kajian akademik dan lanjutan daripada untuk keperluan dakwah umum atau pembelajaran dasar.¹³⁴

Selain metode-metode yang digunakan dalam memahami hadis, pemahaman terhadap hadis Nabi juga membutuhkan keterlibatan berbagai ilmu bantu yang berperan penting dalam mengungkap makna, maksud, serta pesan yang terkandung dalam sabda Rasulullah secara tepat dan kontekstual. Ilmu bantu ini dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang memberikan landasan dan dukungan dalam memahami redaksi, konteks, dan implikasi hukum dari hadis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya. Secara umum, ilmu bantu dalam studi hadis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar. Pertama, disiplin ilmu bahasa dan ushul fiqh, yang mencakup ilmu *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, serta kaidah-kaidah istinbat hukum yang berguna dalam menganalisis struktur dan makna lafaz hadis serta menentukan ketentuan hukumnya. Kedua, ilmu hadis itu sendiri, seperti ilmu *dirayah*, ilmu *jarh wa ta'dil*, *takhrij hadis*, dan *musthalah hadis*, yang sangat penting untuk menilai validitas dan kualitas riwayat, serta memahami metodologi dalam penerimaan dan penolakan hadis. Ketiga, ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, dan sosiologi Islam, yang membantu menempatkan hadis dalam

¹³³ Kurniawan.

¹³⁴ Kurniawan.

konteks sosial, budaya, dan historis kehidupan Nabi serta masyarakat sekitarnya. Kombinasi dari ketiga kelompok ilmu bantu ini menjadikan pemahaman terhadap hadis lebih komprehensif, objektif, dan aplikatif sesuai dengan perkembangan zaman.¹³⁵



¹³⁵ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*.